



“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH PAMANUKAN

(Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan)”

Kamal Ma’ruf, Zainal Arifin

Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

kamalmaruf2207@gmail.com

Abstrak

Evaluasi adalah suatu yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui *outcome* dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu dimana yang dilihat adalah efektifitasnya. Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilaian-penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting yang cukup signifikan di Jawa Barat. Dan ini harus dilakukan sebuah tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar kasus stunting dapat ditekan sehingga anak-anak dapat terpenuhi gizi nya secara optimal demi tumbuh kembangnya. Stunting erat kaitannya dengan pola makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Salah satu langkah kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam upaya menekan kasus stunting adalah Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi; Penyuluhan dan Pemeriksaan IBU Hamil; Pemberian makanan tambahan anak (PMTA); Pengobatan bagi anak gizi buruk yang mengalami sakit; dan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun . Kasus stunting yang ada di wilayah kecamatan Pamanukan pada awal Tahun 2019 ada sebanyak 18 kasus stunting dan ini tersebar di 8 Desa Kecamatan Pamanukan. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, *Stunting*

Pendahuluan

Kebijakan kesehatan mencakup tindakan yang berefek pada kedudukan institusi, organisasi, jasa/pelayanan, dan pertutan keuangan dari suatu sistem pelayanan kesehatan. Namun kebijakan tidak pernah terlepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Baik dari kalangan pemerintah sendiri, industri, dunia usaha, akademis, maupun elemen-elemen masyarakat lainnya (Wendra, 2011).

Kebijakan kesehatan harus selalu di perhatikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan penerapan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan



evaluasi. Evaluasi adalah suatu yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu dimana yang dilihat adalah efektifitasnya. Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilaian-penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi.

Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma.

Indikator Berat Badan Berdasarkan Umur (BB/U) merupakan Interpretasi gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut).

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2018, di Jawa Barat sendiri tercatat ada 29,9% atau 2,7 juta balita yang terkena stunting. Menurut Gubernur, ada 13 kabupaten di Jawa Barat yang akan diintervensi program stunting untuk lebih maksimal. Tiga belas daerah dengan penderita terbanyak di Jawa Barat yang disinggung Gubernur, antara lain Kabupaten Garut (43,2%), Kabupaten Sukabumi (37,6%), Kabupaten Cianjur (35,7%), Kabupaten Tasikmalaya (33,3%), Kabupaten Bandung Barat (34,2%), Kabupaten Bogor (28,29%), Kabupaten Bandung (40,7%), Kabupaten Kuningan (42%), Kabupaten Cirebon (42,47%), Kabupaten Sumedang (41,08%), Kabupaten Indramayu (36,12%), Kabupaten Subang (40,47%), dan Kabupaten Karawang (34,87%).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting yang cukup signifikan di Jawa Barat. Dan ini harus dilakukan sebuah tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar kasus stunting dapat ditekan sehingga anak-anak dapat terpenuhi gizinya secara optimal demi tumbuh kembangnya. Stunting erat kaitannya dengan pola makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi. Biasanya stunting melanda anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Untuk itu, jangka panjangnya perlu ada terobosan pembangunan yang konsen terhadap peningkatan pendapatan setiap masyarakat. Dinas Kesehatan terus mengupayakan pencegahan dengan peningkatan asupan gizi melalui pelayanan di setiap puskesmas.



Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi terpadu yang melibatkan lintas sektor dan menyoar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya membantu terhadap pencegahan stunting.

Salah satu langkah kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam upaya menekan kasus stunting adalah Program Pencegahan Stunting. Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengeluarkan beberapa kebijakan :

1. Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi;
2. Penyuluhan dan Pemeriksaan IBU Hamil;
3. Pemberian makanan tambahan anak (PMTA);
4. Pengobatan bagi anak gizi buruk yang mengalami sakit;
5. Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun .

Kecamatan Pamanukan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten yang luas wilayahnya serta padat penduduknya. Karakteristik penduduknya pun sangat beragam dilihat dari tingkat ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, status perkawinan dan sebagainya.

Berdasarkan data sekunder dan hasil pengamatan dilapangan didapat bahwa kasus stunting yang ada di wilayah kecamatan Pamanukan pada awal Tahun 2019 ada sebanyak 18 kasus stunting dan ini tersebar di 8 Desa Kecamatan Pamanukan. Ini merupakan kasus yang cukup tinggi yang ada dalam suatu wilayah, apabila tidak dilakukan upaya tindakan kebijakan yang tepat maka akan berdampak pada semakin banyak anak stunting.

Selain itu ditemukan juga permasalahan yang terjadi bahwa evaluasi program pencegahan stunting di wilayah Pamanukan belum optimal karena kasus yang ada bukan semakin menurun tetapi terjadi peningkatan. Hal lain nya juga dapat dilihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap Sasaran Ibu Hamil dan Keluarga Baduta belum mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan sosialisasi pencegahan stunting belum mencapai target sasaran dilihat dari jumlah frekuensi penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait.
3. Kurang cukup nya informasi kebijakan mengenai pencegahan stunting yang diterima oleh sasaran Ibu Hamil dan Keluarga Baduta sehingga informasi yang beredar tidak jelas.
4. Keterbatasan sumber daya pelaksana kebijakan sehingga dalam menanggapi masalah kurang cepat.



Kerangka Teori

Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan didefinisikan sebagai berikut :

“Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.”

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi didefinisikan sebagai berikut :

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.”

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijakan publik merupakan :

“Sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Sebuah evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan kenyataan.”

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini berdasarkan kata kunci yang sering kita temukan yaitu di antaranya adalah pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil dan dampak.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:

Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metodemetode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil



kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas.

1. Evaluasi Formal (*formal evaluation*)

Evaluasi Formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif lainnya.

2. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan.

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn, (2003:610)



Pengertian Stunting

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang dan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa mendatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).

Schmidt 2014 dalam Fikawati (2017) mengatakan bahwa stunting juga didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar median kurva pertumbuhan anak WHO (WHO, 2010). Stunting merupakan kondisi kronis buruknya pertumbuhan linear seorang anak yang merupakan akumulasi dampak berbagai faktor seperti buruknya gizi dan kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Schmidt (2014) yang menyatakan bahwa stunting merupakan dampak dari kurang gizi yang terjadi dalam periode waktu yang lama yang pada akhirnya menyebabkan penghambatan pertumbuhan linear.

Penyebab Stunting

Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan.

Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterine growth retardation* sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting (Allen and Gillespie, 2001).

Gizi buruk kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Terdapat tiga faktor utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut :

1. Asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air).
2. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR),
3. Riwayat penyakit.

Dampak Stunting

Stunting dapat mengakibatkan penurunan intelegensia sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Bila mencari pekerjaan, peluang gagal tes wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapat pekerjaan



yang baik, yang berakibat penghasilan rendah (*economic productivity hypothesis*) dan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan. Karena itu anak yang menderita *stunting* berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya pendek.

Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang (Allen & Gillespie, 2001). Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah *stunting* menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro.

Upaya Pencegahan Stunting

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut :

Ibu Hamil dan Bersalin

1. Intervensi pada 1000 HPK;
2. Mengupayakan jaminan mutu *ante natal care* (ANC) terpadu;
3. Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan;
4. Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi, kalori, protein dan mikronutrien (TKPM).

Balita

1. Pemantauan pertumbuhan balita
2. Menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita;
3. Menyelenggarakan stimulus dini perkembangan anak; dan 4. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Anak Usia Sekolah

1. Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
2. Memperkuat kelembagaan Tim Pembina UKS;
3. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS); dan
4. Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba.

Remaja

Penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba; dan

Pendidikan kesehatan reproduksi.

Dewasa

1. Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana (KB);



2. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular); dan
3. Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/ mengonsumsi narkoba (Kemenkes RI, 2018).

Penanggulangan Stunting

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.

Gizi buruk adalah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakitpenyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Status gizi anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang nya. Pada anak yang memiliki status gizi buruk biasanya akan terganggu nya pertumbuhan tubuh secara fisik contohnya anak akan beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan. Disekolah anak tersebut akan sulit mengikuti pelajaran dan sulit untuk berkonsentrasi.

Upaya penanggulangan Gizi buruk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dimaksudkan seperti adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. SKPG adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat. Sedangkan Penanganan gizi buruk dimulai dari tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

1. Efektivitas Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan optimal dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Kebijakan Program Pencegahan Stunting tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik.
2. Efisiensi Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan belum optimal dilihat dari segi pencapaian tujuan program dengan usaha yang dilakukan. Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah dalam Kebijakan Program Pencegahan Stunting, ternyata masih banyak keluarga baduta yang belum terintervensi informasi pengasuhan 1000 HPK dan pola pemenuhan gizi anak.
3. Kecukupan Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan belum optimal, dilihat dari segi seberapa banyak keluarga sasaran mendapatkan informasi mengenai kebijakan stunting tersebut.
4. Responsivitas Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, harus tetap meningkatkan upaya-upaya agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan, harus lebih



maksimal dalam menanggapi keluhan masyarakat walaupun dengan keterbatasan tenaga.

5. Ketepatan Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan dikatakan belum optimal, dilihat dari segi kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah ini belum benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok penerima manfaat dikarenakan berbagai macam kendala di lapangan.

Referensi

- A.G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Allen, L.H dan Gillespie, S.R. 2001. *What Works? A Review of T Efficiency and Effectiveness of Nutrition Interventions*. Manila
- Arikunto, Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1986. *Dasar - Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Burhan, Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Kencana
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fikawati, S. (2017). *Gizi Anak dan Remaja (1st ed.)*. Depok: Rajawali Pers.
- Handyaningrat, Soewarno. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.
- Nugroho, Riant. 2011, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tahir , Arivin. 2014. *Kebijakan Publik & Trasparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press.



Regulasi & Dokumen :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Upaya Perbaikan Gizi

Peraturan Bupati Subang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pencegahan
Stunting di Kabupaten Subang.

Surat Keputusan Nomor : KS.0201/Kep.620-BP4D/2019 Tentang Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Subang.